

Dakwah Di Era Post-Truth: Strategi Verifikasi Informasi Keagamaan Pada Media Digital Islam

Mulia Abdillah Alzain

IAIN Pontianak

muliaabdillah@gmail.com

Syahrul Ruslan Haris

IAIN Pontianak

syahrulruslan12@gmail.com

Article History:

Received: 19 Agustus 2026;
Accepted: 24 Agustus 2026;
Published: 30 Agustus 2026

Abstract. *This study analyzes the practice of da'wah journalism in addressing the challenges of the post-truth era and the strategies used to verify religious information in Islamic digital media. The study employs a qualitative approach using content analysis of religious news published by selected Islamic media portals, supported by an examination of clarification patterns, reference sources, and information validation techniques applied by editorial teams. The findings indicate that the circulation of religious information in digital spaces is highly vulnerable to sensational headlines, fragmented contexts, emotionally driven opinions, and the reproduction of information without adequate confirmation. Islamic digital media that apply the principle of tabayyun tend to employ three main strategies: verification of primary sources, cross-checking with competent religious authorities, and contextual examination prior to publication. The findings also reveal that references to the Qur'an, hadith, scholarly opinions, and institutional sources are not always accompanied by consistent validation and contextual verification. This study emphasizes that da'wah journalism requires the integration of professional journalistic verification standards and Islamic communication ethics to ensure that religious information is not only disseminated rapidly but is also accurate, proportional, and accountable. A tabayyun-based verification model constitutes the main contribution of this study, as it strengthens the credibility of Islamic media while limiting the spread of religious disinformation in digital society. Accordingly, tabayyun should be understood not merely as a normative principle but as an operational framework for improving the quality of contemporary da'wah journalism in Indonesia's post-truth era.*

Keywords:

Da'wah Journalism; Post-Truth; Tabayyun; Information Verification; Islamic Digital Media.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis praktik jurnalisme dakwah dalam menghadapi tantangan *post-truth* serta strategi verifikasi informasi keagamaan pada media digital Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi terhadap pemberitaan keagamaan pada sejumlah portal media Islam, diperkuat melalui kajian terhadap pola klarifikasi, sumber rujukan, dan teknik validasi informasi yang digunakan redaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus informasi keagamaan di ruang digital rentan dipengaruhi judul

sensasional, fragmentasi konteks, opini emosional, dan reproduksi informasi tanpa konfirmasi memadai. Media digital Islam yang menerapkan prinsip *tabayyun* cenderung menggunakan tiga strategi utama, yaitu verifikasi sumber primer, konfirmasi silang kepada otoritas keagamaan yang kompeten, dan pemeriksaan konteks sebelum publikasi. Temuan juga memperlihatkan bahwa penggunaan rujukan Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, serta sumber institusional belum selalu disertai penelusuran validitas dan konteks secara konsisten. Penelitian menegaskan bahwa jurnalisme dakwah memerlukan integrasi antara standar verifikasi jurnalistik dan etika komunikasi Islam agar informasi keagamaan tidak hanya cepat, tetapi juga akurat, proporsional, dan bertanggung jawab. Model verifikasi berbasis *tabayyun* menjadi temuan utama penelitian ini karena mampu memperkuat kredibilitas media Islam sekaligus membatasi penyebaran disinformasi keagamaan dalam masyarakat digital. Temuan tersebut menempatkan *tabayyun* bukan sekadar prinsip normatif, melainkan kerangka operasional verifikasi yang relevan bagi penguatan kualitas jurnalisme dakwah pada era *post-truth* kontemporer di Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan media digital telah mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi informasi keagamaan di tengah masyarakat. Media Islam tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian dakwah, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem jurnalistik digital yang dituntut bekerja cepat, menarik perhatian pembaca, dan berkompetisi dalam arus informasi yang sangat padat. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks pada era *post-truth*, ketika penerimaan informasi tidak selalu ditentukan oleh kekuatan fakta, tetapi sering dipengaruhi oleh emosi, keyakinan kelompok, kedekatan ideologis, dan tingkat viralitas suatu konten (Sofyan et al., 2025). Dalam situasi ini, informasi keagamaan memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi karena kesalahan penyampaian ayat, hadis, pendapat ulama, fatwa, maupun isu keislaman berpotensi membentuk pemahaman keagamaan yang keliru di tengah masyarakat.

Pemberitaan keagamaan pada media digital Islam menunjukkan adanya variasi dalam penerapan prosedur verifikasi. Sebagian pemberitaan telah mencantumkan sumber informasi secara jelas, menggunakan rujukan keagamaan, dan menghadirkan keterangan dari pihak yang dianggap memiliki

kompetensi (Khotimah et al., 2025). Namun, penelitian juga menemukan bahwa pencantuman sumber belum selalu diikuti dengan pemeriksaan terhadap sumber primer. Beberapa informasi masih dibangun berdasarkan kutipan ulang dari media lain, potongan pernyataan tokoh, unggahan media sosial, atau informasi yang sedang viral. Kondisi tersebut menyebabkan proses verifikasi berpotensi berhenti pada identifikasi sumber tanpa memastikan validitas, konteks, dan keutuhan informasi yang disampaikan (Khotimah et al., 2024).

Tidak semua pemberitaan keagamaan menghadirkan sumber pembanding untuk menguji suatu klaim. Pada isu yang kontroversial, perbedaan pendapat keagamaan terkadang disajikan secara parsial sehingga pemberitaan berpotensi memperkuat satu pandangan tanpa memberikan konteks yang memadai. Dalam jurnalisme dakwah, persoalan ini menjadi penting karena media bukan hanya bertanggung jawab terhadap ketepatan fakta jurnalistik, tetapi juga terhadap konsekuensi sosial dan keagamaan dari informasi yang dipublikasikan (Karim, 2024). Kesalahan framing dapat memicu kesalahpahaman, prasangka, bahkan polarisasi di antara kelompok masyarakat.

Persoalan dalam penggunaan dalil dan sumber otoritatif. Ayat Al-Qur'an, hadis, fatwa, maupun pandangan ulama sering digunakan untuk memperkuat legitimasi suatu berita, tetapi proses penelusuran terhadap konteks dalil belum selalu dilakukan secara mendalam (Fail, 2022). Kutipan keagamaan yang dipisahkan dari konteksnya dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda dari substansi sumber asli. Dengan demikian, persoalan verifikasi dalam media Islam tidak cukup diselesaikan melalui mekanisme jurnalistik konvensional, tetapi membutuhkan pendekatan yang mampu mengintegrasikan verifikasi faktual dengan tanggung jawab etis-keagamaan (Fathorrahman, 2025).

Prinsip *tabayyun* memiliki relevansi penting sebagai landasan verifikasi dalam jurnalisme dakwah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa *tabayyun* masih lebih banyak dipahami sebagai norma moral daripada

diterjemahkan menjadi prosedur kerja redaksional yang sistematis (Arifatusshofwah & Shohib, 2025). Belum terdapat pola yang konsisten mengenai bagaimana *tabayyun* diterapkan dalam pemeriksaan sumber, verifikasi dalil, konfirmasi kepada otoritas keagamaan, dan penelusuran konteks sebelum berita dipublikasikan. Kesenjangan inilah yang menjadi persoalan utama penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana media digital Islam menjalankan verifikasi informasi keagamaan, mengidentifikasi kelemahan praktik verifikasi yang berlangsung, serta merumuskan integrasi prinsip *tabayyun* dengan standar jurnalistik sebagai strategi memperkuat akurasi, kredibilitas, dan tanggung jawab jurnalisme dakwah pada era *post-truth*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif untuk menganalisis strategi verifikasi informasi keagamaan yang diterapkan media digital Islam dalam menghadapi fenomena *post-truth*. Penelitian dilaksanakan pada tiga media digital Islam yang aktif memproduksi berita dan konten dakwah. Informan penelitian terdiri atas 12 orang, meliputi tiga pemimpin redaksi, lima jurnalis, dan empat editor konten keagamaan, yang dipilih melalui *purposive sampling* berdasarkan pengalaman minimal dua tahun dalam pengelolaan informasi keislaman. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi terhadap proses produksi berita, serta dokumentasi terhadap 45 konten keagamaan yang dipublikasikan selama periode penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, pengodean, kategorisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada mekanisme pemeriksaan sumber, validasi dalil keagamaan, konfirmasi kepada narasumber kompeten, penggunaan sumber pembanding, dan proses editorial sebelum publikasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member checking*. Hasil proses analisis menunjukkan munculnya pola verifikasi berlapis yang

mengintegrasikan verifikasi jurnalistik, otoritas keagamaan, dan pemeriksaan digital. Pola tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan praktik jurnalisme dakwah dalam meminimalkan penyebaran informasi keagamaan yang manipulatif, emosional, dan tidak terverifikasi pada ekosistem media digital.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pola Verifikasi Informasi Keagamaan pada Media Digital Islam

Praktik verifikasi informasi keagamaan pada media digital Islam berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya arus informasi yang bercampur antara fakta, opini, interpretasi keagamaan, dan konten persuasif di ruang digital. Media yang menjadi objek penelitian tidak lagi memandang verifikasi sebatas pemeriksaan fakta jurnalistik, tetapi juga sebagai proses memastikan legitimasi sumber keagamaan yang digunakan dalam pemberitaan (Daruniah et al., 2026). Setiap informasi yang berkaitan dengan hukum Islam, tafsir ayat, hadis, fatwa, ataupun pandangan keagamaan membutuhkan pemeriksaan yang lebih ketat dibandingkan informasi umum. Redaksi cenderung memeriksa identitas sumber, konteks pernyataan, dan kesesuaiannya dengan referensi keislaman yang dapat dipertanggungjawabkan. Pola tersebut menunjukkan adanya pertemuan antara prinsip jurnalistik modern dengan tradisi verifikasi keilmuan Islam (Tafsir et al., 2024). Dalam praktiknya, proses ini menjadi bagian penting dari upaya media untuk menghindari penyebaran informasi keagamaan yang bersifat manipulatif dan provokatif. Dengan demikian, verifikasi pada jurnalisme dakwah memiliki dimensi faktual sekaligus dimensi otoritatif keagamaan.

Pemeriksaan sumber merupakan tahapan pertama yang paling dominan dilakukan sebelum informasi keagamaan dipublikasikan. Redaksi berusaha mengidentifikasi sumber primer dari suatu pernyataan, terutama apabila informasi tersebut berasal dari potongan video, unggahan media sosial, atau pesan yang telah beredar secara viral. Informasi yang tidak

memiliki sumber awal yang jelas cenderung ditempatkan dalam kategori informasi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Wartawan tidak hanya menelusuri siapa yang pertama kali menyampaikan informasi, tetapi juga melihat kompetensi dan kapasitas sumber dalam menjelaskan persoalan agama. Temuan ini memperlihatkan bahwa popularitas tokoh di media sosial tidak secara otomatis dipandang sebagai indikator otoritas keagamaan. Kredibilitas sumber lebih banyak ditentukan oleh relevansi keilmuan, rekam jejak akademik, serta konsistensi pandangan yang disampaikan (Febriana, 2025). Praktik tersebut menunjukkan bahwa media digital Islam mulai membangun mekanisme penyaringan terhadap fenomena fragmentasi otoritas keagamaan di ruang digital.

Hasil analisis terhadap proses produksi berita memperlihatkan adanya kecenderungan penggunaan sumber berlapis dalam melakukan verifikasi informasi keagamaan. Informasi yang memiliki potensi kontroversi umumnya tidak hanya dikonfirmasi kepada satu narasumber, melainkan dibandingkan dengan pandangan ahli atau sumber lain yang relevan. Praktik *cross-check* dilakukan terutama terhadap isu yang berkaitan dengan perbedaan mazhab, fatwa, konflik keagamaan, serta pernyataan tokoh yang berpotensi menimbulkan polemic (Addzaky et al., 2024). Redaksi berupaya membedakan antara fakta mengenai peristiwa dengan interpretasi keagamaan yang muncul sebagai respons terhadap peristiwa tersebut. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemisahan tersebut penting untuk mencegah interpretasi tertentu dipresentasikan sebagai satu-satunya kebenaran keagamaan. Keragaman sumber juga digunakan untuk memberikan konteks sehingga pembaca dapat memahami posisi suatu pandangan dalam spektrum pemikiran Islam yang lebih luas (Tandhim, 2025). Dengan cara tersebut, verifikasi berfungsi bukan hanya menguji kebenaran informasi, tetapi juga menjaga proporsionalitas pemberitaan keagamaan.

Pada aspek rujukan keagamaan, penelitian menemukan bahwa validasi terhadap ayat Al-Qur'an, hadis, fatwa, dan pendapat ulama

menjadi unsur pembeda utama antara jurnalisme umum dengan jurnalisme dakwah. Redaksi melakukan pengecekan terhadap penulisan ayat, terjemahan, nomor surah, serta konteks penggunaan ayat sebelum materi diterbitkan. Hadis yang digunakan dalam konten juga memerlukan pemeriksaan sumber agar tidak terjadi penyebaran hadis yang tidak jelas kedudukan atau asalnya (Lasido & Arief, 2025). Dalam beberapa bentuk pemberitaan, penjelasan dari akademisi atau ahli agama digunakan untuk memastikan bahwa teks keagamaan tidak dipisahkan dari konteks pembahasannya. Temuan tersebut penting karena sebagian informasi keagamaan yang beredar di media sosial menggunakan kutipan teks suci secara parsial untuk mendukung klaim tertentu. Proses verifikasi referensi menjadi mekanisme untuk mengurangi kemungkinan terjadinya simplifikasi, manipulasi, dan politisasi terhadap teks agama. Dengan demikian, otentikasi sumber keagamaan merupakan elemen sentral dalam sistem verifikasi jurnalisme dakwah digital.

Konteks merupakan salah satu unsur yang paling menentukan dalam membedakan informasi benar dengan informasi yang menyesatkan. Sejumlah informasi yang beredar di media digital secara faktual menggunakan foto, video, atau pernyataan asli, tetapi ditempatkan dalam konteks yang berbeda dari kejadian sebenarnya. Kondisi seperti ini menjadi semakin problematik ketika konten berkaitan dengan simbol agama, kelompok keagamaan, atau tokoh yang memiliki basis pengikut besar. Redaksi karena itu tidak cukup hanya memastikan keaslian materi, tetapi juga memeriksa waktu, lokasi, situasi, dan latar belakang kemunculan informasi (Wuqu, 2026). Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemeriksaan konteks dapat mengubah kesimpulan awal terhadap suatu konten yang sebelumnya terlihat benar. Praktik kontekstualisasi sekaligus mengurangi kecenderungan pembaca membangun penilaian hanya berdasarkan potongan informasi yang emosional. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa verifikasi kontekstual merupakan benteng penting menghadapi pola disinformasi dalam lingkungan post-truth.

Penggunaan perangkat digital juga ditemukan telah menjadi bagian dari proses pemeriksaan informasi pada media Islam yang diteliti. Wartawan memanfaatkan mesin pencarian, penelusuran arsip digital, pemeriksaan akun resmi, dan pencarian sumber pembanding ketika menghadapi informasi yang belum terverifikasi (Ulya, 2025). Pada konten berbentuk foto atau video, penelusuran digital membantu menemukan kemungkinan sumber awal dan jejak penyebarannya. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi belum menggantikan penilaian editorial dan kompetensi jurnalistik manusia. Informasi hasil penelusuran digital tetap diperiksa kembali dengan mempertimbangkan konteks sosial, keagamaan, dan kredibilitas sumber. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi berfungsi sebagai instrumen pendukung, bukan sebagai penentu tunggal kebenaran informasi. Dengan demikian, literasi digital wartawan menjadi kompetensi yang semakin penting dalam praktik jurnalisme dakwah kontemporer.

Mekanisme editorial berperan penting dalam menentukan kualitas akhir verifikasi informasi keagamaan. Materi yang memiliki sensitivitas tinggi cenderung memperoleh perhatian lebih besar dalam proses penyuntingan dibandingkan berita yang bersifat rutin (Yasin, 2025). Editor berfungsi memeriksa ketepatan judul, relevansi sumber, konstruksi narasi, serta kemungkinan munculnya penafsiran yang berbeda dari maksud berita. Penelitian menemukan bahwa judul merupakan bagian yang sangat krusial karena kecenderungan konsumsi informasi digital sering kali berhenti pada judul tanpa membaca keseluruhan isi berita. Oleh karena itu, penggunaan judul yang terlalu sensasional dinilai memiliki risiko memperkuat persepsi keliru meskipun isi berita relatif akurat. Praktik editorial yang baik berusaha menjaga keseimbangan antara kebutuhan menarik perhatian pembaca dengan tanggung jawab memberikan informasi yang proporsional. Temuan ini memperlihatkan bahwa proses verifikasi tidak berakhir pada pemeriksaan fakta, tetapi juga mencakup cara fakta tersebut dikemas dan disampaikan kepada masyarakat.

Pada sisi lain, Kecepatan produksi berita merupakan salah satu hambatan utama dalam proses verifikasi. Karakter media digital menuntut redaksi merespons isu yang berkembang secara cepat agar tidak kehilangan momentum dan perhatian audiens. Tuntutan tersebut kadang menciptakan ketegangan antara kebutuhan untuk menjadi media yang paling cepat dengan kewajiban memastikan keakuratan informasi. Dalam isu keagamaan yang sedang viral, tekanan semakin besar karena konten dapat berkembang dan menyebar dalam waktu yang sangat singkat. Penelitian menunjukkan bahwa media yang memiliki disiplin verifikasi lebih memilih menunda publikasi apabila sumber utama belum dapat dipastikan. Sikap tersebut merupakan bentuk pengutamaan akurasi di atas kecepatan yang sejalan dengan prinsip dasar profesionalisme jurnalistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa kredibilitas media dakwah justru semakin bergantung pada keberaniannya menahan informasi yang belum memenuhi standar verifikasi.

Adanya kesadaran redaksi terhadap pentingnya koreksi dan pembaruan informasi setelah berita diterbitkan. Dalam ekosistem digital, fakta mengenai suatu peristiwa dapat berkembang sehingga informasi awal tidak selalu mampu menggambarkan situasi secara lengkap. Media yang menerapkan prinsip transparansi melakukan pembaruan ketika muncul fakta baru, klarifikasi dari pihak terkait, atau kekeliruan dalam publikasi sebelumnya. Praktik koreksi menjadi penting karena informasi keagamaan yang salah dapat memiliki dampak lebih panjang ketika telah disalin dan disebarluaskan melalui berbagai platform. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme koreksi bukan dipandang sebagai indikasi kegagalan jurnalistik, melainkan sebagai bagian dari akuntabilitas media. Transparansi mengenai perubahan informasi juga membantu pembaca membedakan antara fakta awal dan perkembangan terbaru. Dengan demikian, budaya koreksi memperkuat posisi media digital Islam sebagai lembaga informasi yang bertanggung jawab terhadap public (Hayati et al., 2025).

Verifikasi informasi keagamaan pada media digital Islam memiliki pola yang lebih kompleks dibandingkan verifikasi berita umum. Proses tersebut mencakup pemeriksaan sumber primer, kompetensi narasumber, validitas dalil keagamaan, konteks informasi, pembandingan sumber, serta mekanisme penyuntingan. Temuan ini menunjukkan munculnya model verifikasi yang mengintegrasikan prinsip *fact-checking* jurnalistik dengan tradisi *tabayyun* dalam komunikasi Islam. Integrasi tersebut membentuk karakter khas jurnalisme dakwah yang tidak hanya menuntut fakta benar, tetapi juga menempatkan informasi dalam konteks keagamaan secara bertanggung jawab. Praktik verifikasi menjadi semakin penting ketika masyarakat menghadapi arus konten yang mudah diproduksi, dimodifikasi, dan disebarluaskan melalui media sosial. Kemampuan media untuk mempertahankan disiplin verifikasi pada akhirnya menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap informasi keagamaan yang dipublikasikannya. Berdasarkan temuan tersebut, verifikasi dapat diposisikan sebagai fondasi utama kredibilitas jurnalisme dakwah dalam menghadapi lingkungan komunikasi era post-truth.

2. Strategi Jurnalisme Dakwah dalam Menghadapi Post-Truth dan Mempertahankan Kredibilitas Informasi Keagamaan

Strategi utama media digital Islam dalam menghadapi post-truth adalah memperkuat prinsip *tabayyun* sebagai kerangka etis dalam proses jurnalistik. *Tabayyun* tidak hanya dipahami sebagai anjuran normatif untuk memeriksa informasi, tetapi diterapkan sebagai prosedur praktis sebelum suatu konten dipublikasikan. Dalam praktiknya, prinsip ini terlihat pada kebiasaan mengonfirmasi informasi kepada pihak yang terlibat langsung serta membandingkannya dengan sumber independen. Redaksi menggunakan *tabayyun* untuk menghindari pengambilan kesimpulan berdasarkan potongan narasi yang belum memiliki konteks yang memadai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip tersebut relevan dengan kebutuhan jurnalisme modern untuk mempertahankan

akurasi dalam lingkungan informasi yang sangat cepat (Muliati et al., 2026). Penerapan *tabayyun* sekaligus memberikan identitas epistemologis bagi praktik jurnalisme dakwah yang berakar pada nilai komunikasi Islam. Dengan demikian, strategi menghadapi post-truth tidak hanya bertumpu pada teknologi verifikasi, tetapi juga pada penguatan etika keagamaan dalam proses produksi informasi.

Penguatan otoritas sumber sebagai upaya mengatasi maraknya klaim keagamaan tanpa dasar kompetensi yang memadai. Media berusaha membedakan tokoh yang populer secara digital dengan narasumber yang memiliki kapasitas akademik dan keilmuan sesuai isu yang dibahas. Dalam persoalan hukum Islam, redaksi lebih mengutamakan pandangan ahli fikih atau lembaga yang memiliki kewenangan dibandingkan komentar figur publik yang tidak memiliki kompetensi pada bidang tersebut. Pendekatan serupa diterapkan pada persoalan tafsir, hadis, ekonomi syariah, pendidikan Islam, dan isu sosial-keagamaan lainnya. Temuan ini memperlihatkan bahwa pemilihan narasumber menjadi bentuk verifikasi epistemik yang menentukan kualitas informasi keagamaan (Burhanuddin & Siregar, 2024). Strategi tersebut sekaligus berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi dampak demokratisasi otoritas agama yang tidak selalu diikuti oleh kompetensi keilmuan. Dengan demikian, kredibilitas jurnalisme dakwah ditentukan tidak hanya oleh ketepatan fakta, tetapi juga oleh kualitas otoritas yang menjadi sumber penjelasan.

Strategi kontekstualisasi digunakan untuk menghadapi kecenderungan post-truth yang menempatkan emosi lebih dominan dibandingkan fakta. Redaksi tidak hanya menyampaikan apa yang terjadi, tetapi berusaha menjelaskan mengapa suatu peristiwa terjadi dan bagaimana informasi tersebut harus dipahami secara proporsional. Penambahan konteks menjadi sangat penting ketika berita berkaitan dengan konflik agama, perbedaan pendapat keagamaan, isu identitas, ataupun pernyataan tokoh yang kontroversial. Temuan menunjukkan bahwa konteks yang memadai dapat mengurangi peluang munculnya

kesalahpahaman dan polarisasi pembaca. Strategi tersebut juga membantu membedakan antara fakta, pendapat, interpretasi, dan propaganda yang kerap bercampur dalam konten digital (Zakka et al., 2025). Dengan memberikan latar belakang yang lengkap, media menjalankan fungsi edukasi sekaligus fungsi informasinya kepada masyarakat. Kontekstualisasi karena itu menjadi salah satu strategi fundamental untuk menjaga rasionalitas publik di tengah dominasi narasi emosional era post-truth.

Jurnalistik merupakan instrumen strategis dalam mencegah penyebaran polarisasi keagamaan. Redaksi cenderung menghindari istilah yang bersifat menghakimi, provokatif, atau memberikan generalisasi negatif kepada kelompok tertentu. Pemilihan kata dilakukan secara lebih hati-hati terutama ketika berita berkaitan dengan perbedaan pandangan, konflik antarumat, atau tindakan individu yang membawa identitas agama tertentu (Novanto et al., 2025). Temuan menunjukkan bahwa penggunaan bahasa yang tidak proporsional dapat mengubah fakta menjadi narasi identitas yang berpotensi memicu sentimen kolektif. Oleh karena itu, redaksi mengembangkan kecenderungan untuk memisahkan tindakan individu dengan identitas kelompok yang lebih luas. Praktik tersebut menunjukkan bahwa verifikasi juga mencakup pemeriksaan terhadap konstruksi bahasa dan implikasi sosial dari setiap istilah yang digunakan. Strategi bahasa yang moderat menjadi bagian dari tanggung jawab jurnalisme dakwah untuk menciptakan ruang informasi keagamaan yang lebih sehat dan inklusif.

Penghindaran terhadap praktik *clickbait* yang dapat mendistorsi substansi informasi keagamaan. Penelitian memperlihatkan bahwa tekanan untuk memperoleh jumlah kunjungan tinggi berpotensi mendorong penggunaan judul yang berlebihan dan tidak sepenuhnya mewakili isi berita. Dalam konteks isu agama, praktik tersebut dinilai lebih berisiko karena kata-kata tertentu dapat memicu reaksi emosional dan konflik di antara pembaca. Media yang berorientasi pada kredibilitas berusaha

membangun judul yang tetap menarik tanpa menghilangkan konteks utama informasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian antara judul dan isi menjadi indikator penting dalam mempertahankan kepercayaan audiens. Strategi ini memperlihatkan adanya upaya redaksi untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan memperoleh trafik secara instan (Adnan & Siregar, 2023). Dengan demikian, pengendalian terhadap logika *clickbait* merupakan bagian penting dari resistensi jurnalisme dakwah terhadap karakter ekonomi perhatian dalam lingkungan post-truth.

Penguatan literasi digital audiens juga menjadi strategi tidak langsung dalam meningkatkan kualitas ekosistem informasi keagamaan. Sejumlah konten tidak hanya diarahkan untuk memberikan informasi, tetapi juga mendidik masyarakat mengenai cara mengenali sumber yang kredibel dan membedakan berita dengan opini. Media berperan menjelaskan pentingnya memeriksa asal informasi sebelum pembaca menyebarkannya melalui media sosial atau aplikasi percakapan. Pendekatan edukatif tersebut menjadi relevan karena verifikasi oleh redaksi tidak akan sepenuhnya efektif apabila audiens tetap menyebarkan informasi dari sumber lain tanpa pemeriksaan (Pane & Siregar, 2023). Temuan menunjukkan bahwa jurnalisme dakwah mulai bergerak dari sekadar produsen berita menjadi fasilitator literasi informasi keagamaan. Fungsi ini menempatkan pembaca sebagai bagian dari sistem pencegahan disinformasi, bukan hanya sebagai penerima pasif informasi. Dengan demikian, peningkatan literasi digital masyarakat merupakan komponen strategis dalam membangun ketahanan terhadap post-truth.

Penguatan kolaborasi dengan akademisi, ulama, lembaga keagamaan, dan pihak yang memiliki kompetensi tertentu memberikan kontribusi signifikan terhadap proses verifikasi. Kompleksitas isu keagamaan membuat wartawan tidak selalu memiliki kemampuan untuk menilai seluruh dimensi teologis, hukum, sosial, dan historis suatu informasi secara mandiri. Keterlibatan ahli membantu redaksi memperoleh

perspektif yang lebih akurat dan mengurangi risiko penyederhanaan persoalan keagamaan. Dalam isu yang memiliki banyak pandangan, keberadaan beberapa sumber ahli juga membantu media menggambarkan keragaman pendapat secara lebih proporsional. Temuan ini menunjukkan bahwa jaringan narasumber merupakan bagian penting dari infrastruktur verifikasi media digital Islam. Kolaborasi tersebut memperkuat legitimasi informasi sekaligus meningkatkan kualitas penjelasan yang diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, jurnalisme dakwah di era post-truth membutuhkan ekosistem verifikasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan keilmuan dan keagamaan.

Transparansi redaksional berpengaruh terhadap terbentuknya kepercayaan pembaca. Media yang menjelaskan sumber informasi, menyediakan rujukan yang dapat ditelusuri, serta melakukan koreksi terbuka menunjukkan tingkat akuntabilitas yang lebih kuat. Transparansi menjadi semakin penting ketika berita memuat klaim yang kontroversial atau memiliki konsekuensi sosial-keagamaan yang luas. Pembaca tidak hanya membutuhkan kesimpulan jurnalistik, tetapi juga perlu mengetahui dasar yang digunakan media dalam menyusun kesimpulan tersebut. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap proses verifikasi dapat berfungsi sebagai mekanisme membangun kredibilitas dalam jangka panjang. Strategi transparansi sekaligus membedakan produk jurnalistik dengan konten anonim yang beredar luas melalui media sosial. Dengan demikian, kredibilitas media digital Islam semakin ditentukan oleh kemampuannya menunjukkan proses dan sumber yang melandasi informasi yang dipublikasikan.

Tekanan kecepatan, keterbatasan sumber daya manusia, tingginya produksi konten, dan kompetisi memperoleh perhatian audiens merupakan faktor yang dapat menurunkan kedalaman pemeriksaan informasi. Tidak semua isu memiliki akses yang sama terhadap narasumber ahli, terutama ketika peristiwa berkembang secara cepat dan melibatkan persoalan keagamaan yang sangat spesifik. Selain itu, algoritma media sosial lebih

mudah mengangkat konten yang menimbulkan reaksi emosional dibandingkan konten yang bersifat informatif dan argumentatif. Kondisi tersebut menyebabkan media dakwah harus berhadapan dengan dilema antara kualitas informasi dan tuntutan visibilitas digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi verifikasi akan lebih efektif apabila didukung oleh kebijakan editorial yang jelas dan peningkatan kompetensi wartawan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, penguatan sumber daya internal merupakan prasyarat penting agar nilai ideal jurnalisme dakwah dapat diterapkan secara konsisten.

Secara sintesis, penelitian menemukan bahwa strategi verifikasi jurnalisme dakwah di era post-truth terbentuk melalui integrasi dimensi jurnalistik, teknologi, etika, dan epistemologi Islam. Strategi tersebut meliputi penerapan *tabayyun*, seleksi otoritas sumber, pemeriksaan silang, kontekstualisasi, penggunaan bahasa moderat, transparansi, literasi digital, dan kolaborasi dengan ahli. Temuan menunjukkan bahwa strategi yang hanya mengandalkan pemeriksaan fakta belum cukup untuk menghadapi karakter disinformasi keagamaan yang sering beroperasi melalui manipulasi konteks dan emosi. Jurnalisme dakwah membutuhkan model verifikasi yang mampu menjawab pertanyaan mengenai kebenaran fakta sekaligus validitas sumber dan ketepatan interpretasi keagamaan. Pola ini dapat dipahami sebagai bentuk verifikasi integratif berbasis *tabayyun*, yaitu proses pemeriksaan informasi yang menggabungkan standar jurnalistik profesional dengan prinsip kehati-hatian dalam tradisi komunikasi Islam. Model tersebut menjadi temuan konseptual penting karena memberikan karakter pembeda terhadap praktik jurnalisme keagamaan di tengah transformasi media digital. Dengan demikian, jurnalisme dakwah dapat memainkan peran strategis sebagai penjaga kredibilitas informasi sekaligus penguat literasi keagamaan masyarakat di tengah kompleksitas era post-truth.

D. KESIMPULAN

Jurnalisme dakwah di era *post-truth* menghadapi tantangan serius berupa masifnya penyebaran informasi keagamaan yang bercampur antara fakta, opini, interpretasi, dan narasi emosional. Penelitian menunjukkan bahwa media digital Islam membangun strategi verifikasi melalui pemeriksaan sumber primer, konfirmasi silang, validasi otoritas narasumber, pemeriksaan dalil keagamaan, serta penelusuran konteks informasi sebelum dipublikasikan. Prinsip *tabayyun* menjadi landasan etis yang memperkuat praktik verifikasi jurnalistik karena menekankan kehati-hatian, klarifikasi, dan tanggung jawab dalam menerima serta menyebarkan informasi. Selain itu, penggunaan teknologi digital, penguatan mekanisme editorial, pemilihan bahasa moderat, penghindaran *clickbait*, transparansi koreksi, dan kolaborasi dengan ulama maupun akademisi turut meningkatkan kredibilitas informasi keagamaan. Hasil penelitian juga menemukan bahwa tekanan kecepatan publikasi, kompetisi memperoleh trafik, keterbatasan sumber daya, dan dominasi algoritma media sosial masih menjadi hambatan dalam penerapan verifikasi secara konsisten. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya model verifikasi integratif berbasis *tabayyun* yang memadukan standar profesional jurnalistik, literasi digital, otoritas keilmuan, dan etika komunikasi Islam. Model tersebut dapat memperkuat posisi media digital Islam sebagai sumber informasi keagamaan yang kredibel sekaligus sebagai instrumen edukasi masyarakat dalam menghadapi disinformasi, polarisasi, dan manipulasi informasi pada era *post-truth*.

REFERENSI

- Addzaky, K. U., Hasanah, U., Faddad, Z., Zain, S., Islam, U., Sunan, N., Yogyakarta, K., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2024). Developing Wasathiyah Epistemology : A Literature-Based Study Of Moderate Islamic Knowledge In The Post-Truth Era. *Heutagogia: Journal Of Islamic Education*, 4(2), 199–217. <https://doi.org/10.14421/Hjie.2024.42-05>
- Adnan, S., & Siregar, S. (2023). Studi Analitis Ayat-Ayat Qitāl Dalam Perspektif Tafsir Kontemporer. *Al Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 4(1), 1–15.

- Arifatusshofwah, P., & Shohib, M. W. (2025). Qaulan Sadida In The Perspective Of The Qur ' An And Hadith As Communication Ethics In The Post-Truth Era Of Social Media. *Iseth*, 1550–1555.
- Burhanuddin, A., & Siregar, S. (2024). Studi Komparatif Cendikiawan Muslim Klasik Dan Kontempror Dalam Pembentukan Konsep Dan Prinsip Maqasid Al-Syariah. *I'tiqadiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan*, 2(3), 236–250.
- Daruniah, R., Andini, P. W., & Fatimah, S. (2026). Strategies For Community-Based Da ' Wah : A Case Study Of Santrendelik Semarang In The Post-Truth Area. *Indonesian Journal Of Islam And Society Studies*, 1.
- Fail, M. (2022). Fenomena Taqlid Digital Dan Implikasinya Dalam Bertauhid Di Era Post-Truth. *Journal Of Islamic Thought And Philosophy*, 01(June), 27–49.
- Fathorrahman. (2025). Moderasi Beragama Dalam Kurikulum Aik Di Perguruan Tinggi Muhammadiyah : Tantangan Dan Strategi Di Era Post-Truth. *Wissen: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(2).
- Febriana, F. N. (2025). Pendidikan Islam Di Era Post-Truth : Peran Dan Tantangan Literasi Digital Bagi Generasi Z. *Jurnal El-Fakhru, Islamic Education, Teaching And Studies*, 4(2), 95–111.
- Hayati, B., Yahya, M. A. F., Zakiah, R. I., & Siswanto, A. H. (2025). Kredibilitas Dakwah Dalam Ruang Publik Digital Berbasis Algoritma Studi Penguatan Literasi Digital Bagi Da ' I Dan Masyarakat. *Ashfiya: Journal Of Qualitative Insight In Islamic Studies*, 1(2), 107–118.
- Karim, S. A. (2024). The Relationship Between Islamic Education And Global Ethics In Building Humanistic Awareness In The Post Truth Era. *Spiritus: Religious Studies And Education Journal*, 2, 57–69.
- Khotimah, K., Ekasari, S. R., Kholifah, E. N., & Triyanti, N. A. (2024). Pentingnya Literasi Media Era Disrupsi Digital Dan Post Truth The. *Orasi: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 15(2), 191–198.
- Khotimah, K., Ekasari, S. R., Kholifah, E. N., Triyanti, N. A., Karim, S. A., Fail, M., Indonesia, J. P., Available, W., Arifatusshofwah, P., Shohib, M. W., Daruniah, R., Andini, P. W., Fatimah, S., Tafsir, D., Pudarnya, A., Ulama, O., Post, E., Addzaky, K. U., Hasanah, U., ... Oktaviani, F. (2025). Pendidikan Islam Di Era Post-Truth : Peran Dan Tantangan Literasi Digital Bagi Generasi Z. *Jurnal El-Fakhru, Islamic Education, Teaching And Studies*, 4(2), 1–10. <https://doi.org/10.14421/Hjie.2024.42-05>
- Lasido, N. A., & Arief, M. (2025). Pendidikan Berbasis Dakwah Sebagai Upaya Dalam Membangun Karakter Dan Kesadaran Beragama Di Era Post Truth. *Ahsan: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4, 1–10.
- Muliati, D., Duwi, A., Ziliwu, W., & Oktaviani, F. (2026). Strategi Merespon Hoaks Dan Disinformasi : Literasi Digital Sebagai Bagian Dari Amar Ma ' Ruf Nahi Munkar. *Hadara: Journal Of Da'wah & Islamic Civilization*, 2(1), 65–79.
- Novanto, R. A., Tamrin, Siregar, S., & Sativa, K. O. (2025). Perkembangan

- Digitalisasi Al-Qur'an: Dampaknya Terhadap Pemahaman Generasi Milenial. *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an Dan Hadis*, 2(2), 333–343.
- Pane, R. S., & Siregar, S. (2023). Qiyas Sebagai Konstitusi Keempat Dalam Islam: Implementasi Qiyas Dalam Konteks Siyasah. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 8(2), 153–206. <https://doi.org/10.24952/El-Qanuniy.V8i2.6224>
- Sofyan, A., Fadhila, P., Hidayah, N. M., & Siswanto, A. H. (2025). Basis Ontologi Dakwah Sebagai Fondasi Kesadaran Humanistik Dalam Era Post-Truth. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 28(1), 672–678.
- Tafsir, D., Pudarnya, A., Ulama, O., & Post, E. (2024). Digitization Of Religious Tafsir: The Fading Of Indonesian Ulama Authority In Post Truth Era. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 25(2), 1–9. <https://doi.org/10.14421/Qh.V25i2.5545>
- Tandhim, A. W. A. (2025). Strategi Dakwah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Tembung Dalam Membangun Citra Positif Islam Di Era Post-Truth. *A S A S Wa T A N d h I M*, 4, 249–260.
- Ulya, K. L. H. (2025). Dakwah Digital Multimazhab: Analisis Strategi Komunikasi Islam Moderat Di Era Post-Truth. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(2), 682–687.
- Wuqu, A. N. (2026). Applying Hadith Verification Method As A Critical Framework To Post-Truth And Hoax Phenomena On Social Media. *Jurnal Living Hadis*, Xi, 1–28.
- Yasin, M. (2025). Otoritas Keagamaan Di Era Digital : Tantangan Disinformasi , Dakwah Digital , Dan Rekonfigurasi Wewenang Ulama. *An-Nida: Jurnal Pendidikan Islam*.
- Zakka, U., Hosen, Siregar, S., & Ttr, N. (2025). Eksplorasi Bulan Sebagai Ayat Kauniyah Dalam Tafsir Al-Qur'an. *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an Dan Hadis*, 2(2), 265–284.